

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aditya, Addin, dkk. *Metodologi Penelitian Ilmiah dalam Disiplin Ilmu Sistem Informasi*. Jakarta: ANDI, 2022.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Balaka, Muh. Yani. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Clarkson, C.M.V., dan H.M. Keating. *Criminal Law: Text and Materials*. Edisi ke-7. London: Sweet & Maxwell, 2010.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Edisi ke-2. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Cetakan ke-14. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

- Law Commission. *Criminal Liability in Regulatory Contexts*. London: The Stationery Office, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Cetakan ke-8. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- _____. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press, 1968.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan ke-3. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rosidah, Nikmah. *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung: AURA Publishing, 2019.
- _____. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1985.
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- _____. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- _____. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1985.
- Sitorus, Nanang Tomi. *Buku Ajar Hukum Pidana Militer*. Medan: Universitas Medan Area Press, 2023.

- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Sjarif, Amiroeddin. *Disiplin Militer dan Pembinaannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Sjarif, Amiroeddin. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soegiri, dkk. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: CV. Indra Djaya, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Jurnal, Skripsi & Tesis

- Amu, Robi. "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia terhadap Tindak Pidana Desersi." *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 1–15.
- Banurea, Ecep Pandapotan dan Janpatar Simamora. "Mekanisme Enforcement Hukum bagi Personel TNI yang Terlibat dalam Tindak Pidana Desersi." *Jurnal Hukum* (2024): 4–5.
- _____. "Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 11 (2025): 10.
- Mirtusin. "Tugas Pertahanan TNI dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2010.
- Putri, Rizky Amalia. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Desersi dengan Pemberatan dalam Peradilan Militer." Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2020.
- Ramadhan, Azis Akbar. "Analisis Yurisdiksi Kewenangan Pengadilan Militer Mengadili Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan TNI." *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* 6, no. 9 (2025): 3765.
- Ridhwan, Wahyu. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Anggota TNI." Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.
- Sagala, Parluhutan dan Fredy Ferdian. "Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." Makalah disampaikan dalam Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, United States Defense Institute of International Legal Studies, Jakarta, 18–21 Juli 2016.

- Siahaan, Eden. "Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI yang Melakukan Desersi ke Pihak Musuh dalam Perspektif Hukum Militer Indonesia." *Jurnal Hukum Militer* 5, no. 2 (2019): 88.
- Sugiarto, Totok. "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia terhadap Tindak Pidana Desersi." *Jurnal IUS* 9, no. 1 (2021): 14–27.
- Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. "Hukum Disiplin Prajurit TNI/Militer pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung." Makalah/Karya Tulis (2023): 8.
- Sugistiyoko, Bambang. "Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer." *Yustitia* 4, no. 1 (2018): 51.
- Swandana, M. Dastin Meta. "Kewenangan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang dilakukan oleh TNI." *Jurnal Hukum Militer STHM* 17, no. 2 (2024): 10–11.
- Utomo, Edi. "Kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai Penyidik dalam Sistem Peradilan Militer." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2018): 23–24.

Peraturan Perundang-Undangan & Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa.*

_____. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.*

_____. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.*

Pengadilan Militer II-09 Bandung. *Putusan Nomor 57-K/PM.II-09/AU/III/2025.*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Wetboek van Militair Strafrecht, Staatsblad 1934 Nomor 167) dengan Keadaan Sekarang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Artikel (Web) & Sumber Lainnya

Fahum UMSU. "Hukum Pidana Militer." Diakses 17 Oktober 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-pidana-militer/>.

MH UMA. "Apa Itu Pidana Militer?". Diakses 17 Oktober 2024. <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-pidana-militer/>.

Pengadilan Militer Aceh. "Kekuasaan dan Wewenang." Diakses 15 Januari 2026. <https://dilmil-aceh.go.id/kekuasaan-dan-wewenang/>.

Pengadilan Militer II-09 Bandung. "Data Perkara - Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)." Diakses 8 Januari 2026. <https://sipp.dilmil-bandung.go.id/>.

Sigalingging, Bisdan. "Tindak Pidana Desersi Menurut Hukum Pidana Militer." Diakses 2 Juli 2026. <https://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2011/09/tindak-pidana-desersi-menurut-hukum.html>.